****Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

**Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 3, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

Thelma Wawointana1, A.R.Dilapanga2, Putri A. Kotambunan 3

thelmawawointana@unima.ac.id , abdulrahmandilapanga@unima.ac.id , putrikotambunan123@gmail.com

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  |  A B S T R A C T |
| ***Key word:*****Participatory,****Development** **Planning** Accepted: 15 Juli 2024Revised : 20 Juli 2024Published: 31 Juli 2024 |  | ***Arranging is the underlying and most essential stage being developed. Improvement arranging is the fundamental determinant of the outcome of improvement that will be carried out in a country. Great and exhaustive arranging will deliver great outcomes as well. Subsequently, improvement arranging should include all gatherings not as articles but rather as subjects in the execution of advancement. Being developed preparation, local area support is extremely fundamental. Support is a scaffold between government strategy and local area interests, so provincial arranging should be executed utilizing a base up arranging model or what is called participatory preparation. Participatory arranging is arranging that means to include the interests of the local area, and in the process includes the local area (either straightforwardly or in a roundabout way) however truly the actual arranging is still generally finished from a higher place (top down arranging). This exploration expects to decide the degree of local area cooperation being developed preparation. This exploration was done in Teep Town, East Langowan Locale, Minahasa Rule. This exploration utilizes an engaging technique with a subjective methodology. "In view of the consequences of meetings that have been directed, it shows that local area cooperation being developed arranging is still as thoughts and commitments as thoughts and ideas." It is important to do further effort to the local area, so the local area is more dynamic in arranging improvement that will be completed from here on out.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI  |
| **Kata kunci:**Partisipatif,Pengembangan Perencanaan  |  | Penataan adalah tahap yang paling mendasar dan paling penting yang sedang dikembangkan. Penataan perbaikan adalah penentu mendasar dari hasil perbaikan yang akan dilakukan di suatu negara. Pengaturan yang baik dan lengkap akan memberikan hasil yang baik pula. Selanjutnya, pengaturan perbaikan harus mencakup semua pertemuan bukan sebagai artikel melainkan sebagai subjek dalam pelaksanaan perbaikan. Dalam persiapan pengembangan, dukungan daerah setempat sangatlah penting. Dukungan adalah perancah antara strategi pemerintah dan kepentingan daerah, sehingga penyusunan provinsi harus dilaksanakan dengan menggunakan model penyusunan dari bawah ke atas atau yang disebut dengan penyusunan partisipatif. Penyusunan partisipatif adalah penyusunan 46yang mengikutsertakan kepentingan daerah, dan dalam prosesnya mengikutsertakan daerah (baik secara langsung maupun tidak langsung), namun sebenarnya penyusunan yang sebenarnya tetap dilakukan dari tempat yang lebih tinggi (penyusunan dari atas). Eksplorasi ini diharapkan dapat menentukan tingkat kerja sama daerah yang sedang dikembangkan dalam persiapannya. Eksplorasi ini dilakukan di Kota Teep, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Eksplorasi ini menggunakan teknik yang menarik dengan metodologi yang subyektif. "Mengingat konsekuensi dari pertemuan-pertemuan yang telah diarahkan, menunjukkan bahwa kerja sama daerah yang sedang disusun masih sebatas pemikiran dan komitmen sebagai pemikiran dan gagasan." Penting untuk melakukan upaya lebih lanjut kepada daerah setempat, agar daerah setempat lebih dinamis dalam menata perbaikan yang akan diselesaikan mulai saat ini dan seterusnya. |

# PENDAHULUAN

Diperlukan perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kota bersama mitranya. *“*Perencanaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, menengah dan sesaat sangatlah penting agar pengembangan dapat terus berjalan dengan baik.

 Yang perlu kita pahami, penataan kota dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) proses; pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, maka RPJM-Desa harus disusun secara tepat dan sesuai dengan tujuan, kondisi, dan kebutuhan lingkungan setempat. Oleh karena itu, cara paling umum untuk menyelidiki pemikiran dan tujuan individu serta mengenali potensi, masalah, dan pengambilan keputusan. Kedua, Rencana Kerja Perbaikan Kota (RKP) dengan jangka waktu 1 (tahun).

 Keunikan yang menarik dari proses perencanaan pembangunan partisipatif juga terjadi di Kota Teep, Kecamatan Langoan Timur, Kabupaten Minahasa, khususnya pada bagian persiapan pengembangan dukungan daerah yang meliputi sistem perencanaan pembangunan secara basis ke atas yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT ke atas. ke Musrenbang Kota. Pemerintah kota belum menguraikan daerah setempat dalam memilih kebutuhan. Meskipun demikian, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang tepat, terarah, dan berdaya guna, diperlukan dukungan daerah dalam perencanaan pembangunan karena daerahlah yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkannya, sehingga kerjasama daerah dapat memenuhi kecenderungan mereka selama waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan Rencana Peningkatan Jangka Waktu. Pusat Kota.”

 Gerakan Musrenbang Kota yang seharusnya mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat di Kota Teep, Daerah Langoan Timur, Kabupaten Minahasa, nyatanya hanyalah sebuah tindakan yang patut dilakukan oleh aparat. *“*Pihak kota dan beberapa perintis daerah setempat tak sedikit pun ikut menyampaikan kerinduan warga Kota Teep, Kawasan Langoan Timur, Pemerintahan Minahasa.

 Sehingga pada akhirnya perencanaan perbaikan tersebut dilakukan tanpa dilandasi oleh gagasan dari masyarakat setempat, namun hanya sekedar asumsi dan evaluasi dari kumpulan pemerintah kota.

 Masalah selanjutnya adalah kurangnya pemahaman. Sikap apatis masyarakat terhadap perencanaan pembangunan secara keseluruhan disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami proses perencanaan pembangunan.” Sehingga selama sistem penataan tidak ada “rasa” yang muncul dari daerah setempat untuk terlibat di dalamnya. Hal ini dikarenakan belum adanya pemberitahuan pasti dari pemerintah kota mengenai interaksi perencanaan pembangunan, apa dan bagaimana pertemuan perencanaan kota, apa saja atraksi yang disuguhkan, dan lain-lain.”

1. **METODE PENELITIAN**

 *“*Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena berupaya

47

menggambarkan secara akurat kondisi dan gejala masyarakat tertentu di lokasi penelitian (Idrus, 2009: 24). Para ilmuwan berupaya menyelidiki, mengenali, memetakan dan memahami bagaimana daerah setempat mendukung persiapan pembangunan di Kota Teep, Daerah Langowan Timur, Pemerintahan Minahasa.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa disini peneliti memfokuskan masalah pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Teep

Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan berlandaskan pada sinergi masyarakat dengan pemerintah, terutama ditingkat paling bawah yaitu pemerintah desa, dimana pemerintah dengan masyarakat setempat belajar mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki bersama, dengan demikian hasil dari setiap tahapan pembangunan bisa lebih membumi, dalam pengertian ini masyarakat merasa memiliki hasil pembangunan dan keterlibatannya secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, yang melibatkan mereka secara penuh.” Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Teep

Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, ada beberapa pertanyaan yang telah di tanyakan kepada Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.

 *“*Gagasan perbaikan partisipatif tidak terlepas dari kekuatan daerah, dukungan daerah dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa bangga dan kesadaran akan harapan orang lain terhadap perbaikan daerah. Karena mereka adalah individu yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan, serta mampu mengembangkan bidangnya sendiri. Mereka akan melibatkan dan menilai pencapaian atau kekecewaan kemajuan di ruang mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai perubahan yang bermanfaat, semua program perencanaan perbaikan harus melibatkan lingkungan setempat.

 Peneliti menggunakan tiga metode pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan berbasis masyarakat di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, yaitu: memperhatikan kepentingan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dan kerjasama antar desa. masyarakat dan pemerintah desa. pengaturan perbaikan.”

1. Perencanaan Pembangunan

 Seringkali proses perencanaan perbaikan tidak menciptakan tatanan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. *“*Hal ini disebabkan kurangnya batasan dari pemerintah daerah setempat secara keseluruhan dan pemerintah lingkungan secara khusus dalam mengatur perbaikan ruang mereka. Oleh karena itu, proses penataan pembangunan kawasan kota harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan, baik dalam bidang pengendalian maupun penataan, selain itu juga harus ada bantuan dari pemerintah dalam penataan pembangunan kawasan. Peran koordinasi harus ditingkatkan, khususnya melalui setiap orang di daerah dan otoritas pembangunan yang mempunyai pemahaman yang sama dalam memahami arah perbaikan. Penting untuk menyiapkan alat perencanaan pengembangan sehingga dapat mengharapkan adanya perkembangan yang datang baik dari kebutuhan masyarakat setempat maupun sesuai dengan perkembangan acara masyarakat.

Tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapain tujuan, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, serta untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah kota hendaknya berupaya untuk menetapkan wilayah setempatnya, baik dalam mengambil bagian dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Apabila dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perencanaan pembangunan akan berhasil dan tepat sasaran.

Tetapi, berhasil tidaknya proses perencanaan pembangunan sangat ditentunkan oleh sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Masyarakat juga harus ikut ambil bagian untuk mensukseskan tujuan yang akan dilakukan di desa.

 Ada dua hal yang harus dilakukan oleh otoritas publik. Pertama: harus optimis terhadap tujuan yang dikomunikasikan oleh daerah setempat, dan harus peka terhadap kebutuhan masyarakatnya. Otoritas publik harus memahami apa yang dibutuhkan masyarakatnya dan memperhatikan keinginannya.” Kedua, pemerintah perlu mengikutsertakan segenap kemampuan masyarakatnya dalam melaksanakan pembangunan. *“*Oleh karena itu, otoritas publik perlu menempatkan individu sebagai subjek kemajuan, selain sebagai objek perbaikan.

48

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di

Desa Teep

1. Wujud atau dimensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat

Pada dasarnya kemajuan kota adalah perbaikan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi kedudukan wilayah kota, maka semakin cepat pula perkembangan kota dimaksud dapat dipahami, khususnya dalam kemandirian wilayah yang sedang berlangsung. Kehadiran jaringan kota yang sedang dikembangkan sangatlah penting, dimana tugas dukungan wilayah setempat terbuka untuk membantu memutuskan dan mengarahkan kepastian pengaturan perbaikan wilayah. Dengan hasil data yang telah dtemukan dapat disimpulkan bahwa wujud atau dimensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teep di kategorikan sudah cukup baik. Karena masyarakat sebagai subjek dan objek dari pembangunan dirasa perlu memberikan peran aktif baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan jalannya proses pembangunan tersebut.

 Suatu pemikiran atau pemikiran yang cemerlang dapat menunjang kemajuan suatu rencana yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan. Oleh karena itu, diyakini bahwa komitmen kontemplasi sebagai ide atau pemikiran dapat membantu dalam upaya mencapai dan mengembangkan lebih lanjut program perbaikan yang ditakdirkan dan telah dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal.”

1. Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan.

Untuk melaksanakan suatu pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat beruoa partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. *“*Namun, tidaklah hal yang mudah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa perlu melibatkan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan, karena dengan melibatkan masyarakat dapat membantu pemerintah daerah dalam memajukan program desa. Namun pada kenyataannya masih ada saja masyarajat yang enggan atau tidak peduli terhadap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tersebut.

c. Kesesuaian pembangunan daerah yang akan dilakukan dengan kebutuhan masyarakat.

Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa ada yang merasa dirugikan. Dilihat dari kenyataan yang ada dilapangan bahwa pembangunan di desa ini ada yang belum sesuai dengan harapan masyarakat desa. Jalanan yang terbuat dari aspal merupakan fasilitas publik yang setiap hari selalu digunakan oleh masyarakat. Jika aspal rusak atau berlubang sudah pasti mengganggu pengguna jalan. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan jalan aspal cepat rusak, diantaranya mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik, muatan kendaraan yang berlebihan, serta air yang mengalir dibadan jalan atau tidak ada saluran. Sudah seharusnya Kepala Desa atau perangkat desa cepat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah jalan aspal yang rusak tersebut agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan aman dan nyaman.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat belum puas terhadap hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan. *“*Sudah seharusnya perangkat desa mengevaluasi kembali hasil pembangunan apakah sudah sesuai dengan standar pengerjaan dan perencanaan atau belum.

3. Kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

 Dengan diberlakukannya kemerdekaan teritorial, negara-negara provinsi diharapkan memberikan dukungan yang besar kepada daerah setempat, serta mengikutsertakan daerah setempat yang sedang dikembangkan. Latihan-latihan yang dilakukan di kabupaten tersebut, khususnya dengan memberikan pintu terbuka kepada daerah setempat untuk ikut serta dalam pembangunan. Dengan memasukkan investasi daerah, maka daerah akan merasakan kepemilikan dan kewajiban terhadap peningkatan kemajuan daerahnya. Namun, seharusnya masyarakat dilibatkan dalam semua proses pembangunan di desa, tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam hal pelaksanaan sampai pemeliharaan pembangunan. Tidak hanya itu, koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat juga harus terjalin dengan baik, agar apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan, koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat masih kurang.

49

Kerjasama daerah sangat penting untuk dikembangkan persiapannya, karena daerah lebih mengetahui apa yang mereka perlukan, sehingga perencanaan perbaikan tentu ingin berjalan lebih nyata dan efisien, dan daerah biasanya akan mempunyai rasa tanggung jawab. Dukungan daerah yang dikembangkan harus terlihat mulai dari perencanaan perbaikan, perencanaan proyek pembangunan hingga tahap pengecekan.

Dalam menyusun suatu program penataan perbaikan, daerah setempat harus menjadi kebutuhan utama dalam menyelesaikan penataan perbaikan kota dimana daerah setempat harus benar-benar terlibat didalamnya.” Jika kerja sama anatara pemerintah desa denga masyarakat di desa masih kurang, maka program perencanaan pembangunaan yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai dengan baik.

**IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan data hasil penelitian serta pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan selama ini serta memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam hasil penelitian ini. *“*Kesimpulan kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Kelompok masyarakat merupakan salah satu subsistem suatu kota dan kurang terlibat dalam siklus perbaikan di kota. Pencantuman ini dimulai dari tahap pengaturan kemajuan, pelaksanaan hingga penilaian hasil perbaikan. Tanpa adanya perkumpulan kelompok masyarakat, dampak perbaikan tidak akan terjamin mampu menjawab kebutuhan daerah dan bantuan pemerintah daerah tidak akan terlaksana. Kerjasama yang diberikan oleh daerah yang sedang dibangun penataannya masih berupa pemikiran dan komitmen sebagai pemikiran dan gagasan kemajuan yang akan dilaksanakan. 3. Kerja sama daerah merupakan faktor penting dalam perbaikan kota." Dukungan kelompok masyarakat yang tinggi dapat memahami tujuan pembangunan dengan cara yang efisien dan layak.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. 2006.

[2] M. Rantung, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Online Di Masa Pandemi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa,” *J. Ilm. Mandala Educ.*, Vol. 8, No. 2, Pp. 1786–1794, 2022, Doi: 10.58258/Jime.V8i2.3048.

[3] T. Joshua, V. Kasenda, And D. Monintja, “Efektivitas Pelayanan Akta Kelahiran Secara Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado,” *Governance*, Vol. 1, No. 2, Pp. 1–8, 2021.

[4] A. M. Izdihar And I. Hasan, “Efektifitas Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Portal Klampid New Generation Di Kelurahan Ujung Surabaya,” *Praja Obs. J. Penelit. Adm. Publik*, Vol. 3, No. 04, Pp. 31–41, 2023.

[5] N. Abrori, “Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Dengan Metode Analisis Faktor,” *J. Lebesgue J. Ilm. Pendidik. Mat. Mat. Dan Stat.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 242–255, 2022, Doi: 10.46306/Lb.V3i1.117.

[6] A. Dilapanga, “Responsivitas Pelayanan Publik Di Era Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. Dan Ilmu Adm. Negara*, Vol. 3, No. 1, Pp. 28–34, 2021, Doi: 10.53682/Administro.V3i1.2052.

[7] S. Pratomo, I. Kertati, And Harsoyo, “Pemberdayaan Kader Pkk Dalam Fasilitasi Akta Kelahiran Anak Di Kota Semarang,” *J. Suara Pengabdi.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 180–197, 2022.

[8] D. W. N. Ningrum, D. R. S. E. Nurgraha, I. Wulandari, And M. A. R. S. Fauziyyah, “Faktor Keberhasilan Program Silasidakep Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Sumedang,” *J. Reg. Public Adm.*, Vol. 7, Pp. 56–66, 2022.

[9] I. Nirmala, “Inovasi Pelayanan Online Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,” *Kagangajurnal Pendidik. Sej. Dan Ris. Sos. Hum.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 128–135, 2022, Doi: 10.31539/Kaganga.V5i1.3573.

[10] T. Yuliyanti, A. Soesiantoro, And E. Dewantara, “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kelurahan Perak Timur Kota Surabaya,” *Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2022.

[11] S. A. Sumiati And L. Lestari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” *J. Dimens.*, Vol. 9, No. 1, Pp. 35–47, 2020.

50

[12] M. M. Mandagi, J. Mantiri, And S. B. Kairupan, “Sub-Theme : Leadership And Crisis Implementation Of Smart Governance In Realizing Tomohon Smart City,” *Proc. Iapa Annu. Conf.*, Pp. 437–448, 2020, Doi: Https://Doi.Org/10.30589/Proceedings.2020.420.

[13] O. Bida, C. M. Siwi, And M. Jeane, “Pkm Penggunaan Aplikasi Edukcapil Tomohon Bagi Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon,” *J. Pengabdi. Mandiri*, Vol. 1, No. 12, Pp. 2431–2436, 2022.

[14] M. R. Sudanto And N. M. Ikmal, “Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pelayanan Online Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Di Kantor Kelurahan Made,” *Jisp (Jurnal Inov. Sekt. Publik)*, Vol. 2, No. 2, Pp. 1–21, 2022, Doi: 10.38156/Jisp.V2i2.138.

[15] J. C. Kaligis, *Inovasi Pelaksanaan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Joe Chevalier Kaligis Npp. 28.1176*.

[16] Sugiyono, *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung, 2013.

51